

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN DISERTASI	viii
DISSERTATION SUMMARY	xxxiv
KATA PENGANTAR	lviii
DAFTAR ISI	lxi
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL	lxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	23
E. Kerangka Konseptual	24
1. Rekonstruksi.....	26
2. Pengelolaan Pasar Rakyat	29
3. Tempat Berjualan.....	32
4. Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan.....	33

5. Perjanjian	33
6. Konsep Keadilan.....	35
F. Kerangka Teori.....	38
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Utama): Teori Keadilan.....	46
a. Keadilan Menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945.....	46
b. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia	46
c. Ideologi Pancasila yang direalisasikan melalui Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945.....	54
d. Keadilan Perspektif Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.....	56
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum.....	58
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi)	65
a. Teori Kewenangan.....	65
b. Teori Hukum Progresif	79
G. Kerangka Pemikiran.....	86
H. Metode Penelitian	91
1. Paradigma Penelitian	91
2. Jenis Penelitian.....	93
3. Metode Pendekatan.....	95
4. Sumber Data.....	96

I.	Orisinalitas	94
J.	Sistematika Penulisan	97
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	99
A.	Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	99
B.	Sistem Peradilan Pidana	107
C.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	132
D.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	156
E.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	189
F.	Pembuktian	201
G.	Saksi dan Pelapor	201
H.	Ketentuan yang Berkaitan dengan Perlindungan Saksi	208
BAB III	PRINSIP PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SAAT INI	213
A.	Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	213
B.	Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 420/ PID.B/2001/PN.JKT.BAR	232
C.	Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.....	256
D.	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor	302

Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Masih Belum Mencerminkan Nilai Keadilan	
---	--

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT INI ...	310
A. Kelemahan Substansi Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini	310
B. Kelemahan Struktur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini	332
C. Kelemahan Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini	338
BAB V REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT	350
A. Konstruksi Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor di Berbagai Negara	350
B. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	360
C. Temuan Teori Hukum Baru	365
BAB VI PENUTUP	367
A. Kesimpulan	367

B. Saran	368
C. Implikasi Kajian Disertasi	369
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL/DIAGRAM

TABEL 1.1. Perbedaan antara Atribusi, Delegasi dan Mandat.....	78
DIAGRAM 1.1. Alur Kerangka Pemikiran	90
TABEL 1.2. Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	108
TABEL 3.1. Klasifikasi Pasar-Pasar Yang Dikelola Oleh PD. Pasar Kota Medan .	252
TABEL 5.1. Rekonstruksi Pembaharuan Peraturan Daerah Kodati II Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan	360